

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan cepat. Setiap tahunnya banyak teknologi-teknologi baru yang bermunculan, dimana semua hal bisa dilakukan melalui perangkat teknologi yang terkoneksi secara *online*. Sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi mudah terutama dalam mencari informasi. Hal ini membuat arus informasi sangat cepat dan mudah diakses masyarakat karena itulah masyarakat selalu mengikuti perkembangan informasi yang ada. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus menyesuaikan pelayanannya sesuai dengan gaya hidup masyarakatnya. Karena, pada saat ini masyarakat lebih senang mencari informasi melalui internet (Kulonprogokab.go.id, 2019).

Dengan hadirnya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Strategi Nasional Pengembangan *E-government* menjadi latar belakang pengembangan *Electronic Government* di Indonesia. Adanya inpres ini mendorong seluruh lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menunjang aktivitas pemerintahan. Dalam merealisasikan inpres tersebut pemerintah ikut menyesuaikan pelayanan publiknya dengan memberikan pelayanan publik komunikasi dan informasi berbasis teknologi internet dalam bentuk *Electronic Government* (Hazmi, 2014).

Electronic Government merupakan salah satu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yaitu internet dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada publik berbasis *website* atau aplikasi. Dan itu sebabnya banyak perusahaan dan instansi membuat *website* resmi agar terus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam mengetahui informasi-informasi *update* mengenai unggahan *website* tersebut. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang *ter-update*, efisien dan efektif kepada masyarakat dengan menggunakan media berbasis internet (Prof. Eko, 2006).

Pemerintah Kota Depok memiliki visi untuk mewujudkan Kota Depok sebagai Kota Cerdas (*Smart City*). Konsep *Smart City* ini mengelola semua potensi sumber daya secara efektif dan efisien serta mempermudah masyarakat Depok untuk mendapatkan layanan dan informasi dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan, mematangkan, memantapkan penyelenggaraan dan merencanakan pemanfaatan *Electronic Government*. Salah satu bentuk Implementasi *Electronic Government* dalam penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah dengan menyediakannya informasi pasar kerja berbasis *online* (Depok.go.id, 2019).

Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah dan pembangunan dibidang ketenagakerjaan seperti penempatan tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan

syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja dan pengangguran (Syahrul, 2014).

Dalam UU No.13 Tahun 2013 Pasal 4 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pemerataan Kesempatan Kerja Dan Penyediaan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah, menjelaskan bahwa : Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah (Talenta.co, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Permentakartrans No. PER.07/MEN/IV/2008 tentang sistem penempatan tenaga kerja, dalam peraturan tersebut menetapkan tugas dan fungsi lembaga penempatan tenaga kerja publik di setiap tingkatan, baik itu Pusat, Propinsi dan Kab/Kota. Sehingga dengan aturan ini diperjelas bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja dilakukan oleh DISNAKER Kab/Kota yang meliputi informasi pasar kerja, pembinaan dan koordinasi dengan instansi lain. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan kerja yang sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan tenaga kerja perlu dilakukan penyempurnaan. Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dimana setiap tenaga kerja berhak memilih, mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak (Kemnaker.go.id, 2016).

Dalam mempermudah mengimplementasikan salah satu tugas pokok DISNAKER tersebut membutuhkan suatu sistem dengan memanfaatkan teknologi sehingga informasi pasar kerja mudah diakses, akurat, efisien dan efektif. Dinas Tenaga Kerja Kota Depok menciptakan inovasi dalam pelayanan yaitu pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) yang dapat diakses melalui <https://bkol.depok.go.id/>. Website ini dibuat untuk menjembatani para pencari kerja dengan perusahaan dan diharapkan dapat menurunkan jumlah angka pengangguran di Kota Depok. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk realisasi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman *Electronic Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 sebesar 6,64 persen, 2019 sebesar 6,11 persen, 2020 sebesar 9,87 persen, dan 2021 sebesar 9,76 persen. Dalam berupaya menurunkan jumlah angka pengangguran bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja tetapi pihak Swasta maupun *Stakeholder* terkait harus punya adil dan kontribusi didalamnya (Depokkota.bps.go.id, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh, data jumlah pencari kerja yang terdaftar per-Agustus 2021-2022 sebesar 4,757 orang, sementara itu menurut data statistik BPS Kota Depok jumlah pencari kerja per-Agustus 2021-2022 sebesar 4,169 orang. Dalam hal ini terlihat masih banyak jumlah pencari kerja yang menganggur. Sehingga dibutuhkan solusi dalam mengatasi hal tersebut.

Dinas Tenaga Kerja Kota Depok memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat seputar informasi kerja yang dapat diakses secara *online* yaitu melalui Bursa Kerja *Online*. Sebelumnya, para pencari kerja dalam mendapatkan informasi seputar dunia kerja melalui *Job Fair Offline* yang diselenggarakan oleh DISNAKER dengan cara datang langsung ke *event-event* yang diadakan ditempat tertentu. Sehingga hal tersebut menyebabkan antre yang cukup panjang dan pelaksanaan menjadi tidak kondusif, perlu waktu, dan biaya. Selain memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi kerja diharapkan di dalam pelayanan Bursa Kerja *Online* memberikan solusi untuk para pencari kerja yang tidak diterima kerja.

Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana bentuk inovasi dari *Electronic Government* tersebut sudah terimplementasikan dengan baik atau tidak nya dalam memberikan kemudahan proses pelayanan melalui pelayanan *online* dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan berjudul “**Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok.
2. Menganalisis hambatan yang terjadi pada Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berbagi penelitian tentang Implementasi *Electronic Government* telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang

dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) jurnal & skripsi. Namun peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok.

Rujukan pertama pada penelitian ini, Implementasi *E-government* Melalui Bursa Kerja *Online* Pada Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Citra Annisa, 2011). Hasilnya sebagai konsekuensi dari pembentukan *e-government* melalui Bursa Kerja *Online*, komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi efektif, langsung, dan ditandai dengan struktur hubungan yang baik. Masih banyak kesalahpahaman antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, serta sosialisasi yang masih kurang efektif, Sumberdaya untuk melaksanakan strategi ini tidak memadai, dalam hal staf, otoritas, informasi, dan infrastruktur untuk memenuhi tujuan *e-government* secara maksimal. Sementara itu, pelaksanaan Bursa Kerja *Online* masih buruk dalam hal disposisi karena masalah insentif. Kerangka birokrasi dalam penerapan *e-government* melalui Bursa Kerja *Online* berjalan dengan lancar, dan tidak ada kendala dalam layanan penempatan kerja Bursa Kerja *Online*.

Teori yang digunakan dalam skripsi tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari segi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang baik, sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Rujukan Kedua dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan *e-Government* Tentang Bursa Kerja *Online* (BKOL) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung oleh (Yogi Yolanda Melta, 2018). Hasil penelitian menunjukan bahwa

implementasi kebijakan Bursa Kerja *Online* Belum Berjalan Optimal. Dilihat dari Komunikasi sudah berjalan namun penyampain informasi masih belum begitu jelas. Dilihat dari sumber daya sudah berjalan namun masih ada permasalahan yaitu kurang *update* nya informasi. Dilihat dari Disposisi sudah berjalan karena karena tingkat kepatuhan aparatur tinggi. Dilihat dari Struktur Birokrasi sudah berjalan namun masih ada permasalahan yaitu kurangnya pembagian tanggung jawab.

Pembahasan skripsi diatas sangat berkaitan erat dengan penelitian ini dalam membahas tentang Implementasi Bursa Kerja *Online*. Sehingga, dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian ini serta menunjang dalam studi pendahuluan.

Rujukan Ketiga dengan judul penelitian *E-service* Dalam Bursa Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Kabupaten Gowa (Andi Muh Fikram AW, Musliha Karim, & Adnan Ma'ruf, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa *e-service* dalam bursa kerja belum tercapai secara maksimal hal ini dilihat dari aspek penyedia layanan dimana petugas yang menjalankan tugasnya meskipun telah sesuai dengan prosedur namun belum sepenuhnya berhasil menghadirkan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Dari aspek lain seperti pengguna layanan dan saluran pelayanan juga belum tercapai secara maksimal. Faktor pendukung adalah sikap kepemimpinan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sedangkan faktor penghambat adalah infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pembahasan jurnal diatas sangat berkaitan erat dengan penelitian ini dalam membahas tentang Bursa Kerja yang dilihat dari aspek penyedia dan penyaluran layanan yang diberikan belum maksimal sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Rujukan Keempat dengan judul penelitian Implementasi *e-Government* Melalui Bursa Kerja *Online* di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Doni Priadi, 2017). Indikator implementasi *e-government* antara lain dukungan, kapabilitas, dan nilai. Hasilnya bahwa implementasi *e-government* melalui bursa kerja *online* di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak belum berjalan efektif. Dukungan dan alokasi sumberdaya telah berjalan dengan baik, namun sosialisasi dan pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pendukung belum berhasil dilaksanakan. Dari sisi indikator kapasitas, ketersediaan SDM dan ifrastruktur telah dilaksanakan secara efektif, namun ketersediaan sumberdaya keuangan belum. Dari sisi indikator nilai, pemerintah dan masyarakat mendukung pelaksanaan bursa kerja *online*, sedangkan perusahaan kurang antusias dengan penyelenggaraan layanan pasar kerja *online*.

Dalam skripsi tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena membahas Implementasi Bursa Kerja *Online*. Pembahasan jurnal tersebut menunjang penelitian ini. Karena, dalam pelaksanaan sosialisasi belum terimplementasikan dengan baik. Sehingga, hasil penelitian jurnal tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk proses sosialisasi Bursa Kerja *Online* yang dilakukan oleh pihak DISNAKER.

Rujukan Kelima dengan judul penelitian Efektivitas Penerapan Sistem *E-performance* di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Aditya Rahmat Bachtiar, 2014). Hasilnya menampilkan bahwa sistem E-performance pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya efektif. Hal ini terlihat dari evaluasi masing-masing sub variabel efikasi sistem e-performance yang mencapai >90%, kualitas 99.3%, kuantitas 98,6%, dan kerja perilaku 99,3%. Dengan memakai nilai responden, sistem e-performance Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya cukup efektif. Evaluasi penggunaan sistem e-performance di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sangat efektif. Hal ini terlihat dari bagaimana responden menilai setiap subvariabel 80% hingga 100%.

Jurnal tersebut relevan dengan penelitian ini. Karena, berisi tentang sistem akuntabilitas kerja yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja staf dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dapat menjadi referensi dalam penelitian ini.

Rujukan Keenam dengan judul penelitian Strategi Pemerintah Dalam Memperkecil Angka Pengangguran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Romika & Ernawati, 2014). Hasilnya bahwa upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran telah berhasil namun belum optimal. Kelemahan dan bahaya seperti minat yang rendah dalam mengisi lowongan pekerjaan di luar daerah, informasi lowongan pekerjaan yang membingungkan, kurangnya pengalaman dan kemampuan, serta datangnya orang asing untuk mencari pekerjaan menjadi kendala bagi pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran di kecamatan menarik Kota Pekanbaru. Pemerintah mengadakan

pameran kerja dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja sehingga pencari kerja dapat dengan mudah menemukan posisi yang sesuai dengan aspirasi, pengetahuan, dan kemampuan mereka.

Hasil jurnal tersebut berkaitan dengan penelitian ini. Karena, membahas tentang strategi yang dilakukan pemerintah dalam memperkecil angka pengangguran sehingga pelaksanaannya dapat menjadi acuan penelitian ini.

Rujukan Ketujuh judul penelitian tentang Implementasi *e-Government* Sistem Dalam Upaya Peningkatan *Clean And Good Governance* di Indonesia oleh (Kusuma Dewi Arum Sari, 2012). Berlandaskan temuan studi tersebut, pertumbuhan sistem e-government di Indonesia sudah mulai berkembang secara kuantitas, namun kualitasnya masih kurang. Untuk lebih meningkatkan perkembangan e-government di Indonesia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, pemerintah harus berkomitmen untuk menyempurnakan pengembangan e-government, khususnya dalam hal infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi, dan sosialisasi pemerintah dan Komunitas. Jika dilakukan secara serius, dapat membantu keberhasilan penyebaran e-government dan meningkatkan kualitas layanan publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif di Indonesia.

Jurnal tersebut relevan dengan penelitian ini yang membahas tentang Implementasi *Electronic Government* dalam memperbaiki mutu pelayanan publik. Sehingga, dapat menjadi referensi dalam penelitian ini.

Rujukan Kedepalan membahas tentang Pengaruh Media Bursa Kerja *Online* Disnakertrans Provinsi Banten Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Kerja Dikalangan Mahasiswa Tingkat Akhir Jurusan Ilmu Komunikasi Untirta (Muhammad Badra & Hirlandio Laya, 2017). Menurut temuan, nilai RSquare ialah 0,814. Kondisi ini menampilkan bahwa 81,4% varians pada variabel pemenuhan tuntutan informasi lowongan pekerjaan dijelaskan oleh variabel media pasar kerja online. Sedangkan 18,6% dijelaskan oleh faktor lain. Berlandaskan hasil pengujian diketahui bahwa media bursa kerja online berpengaruh terhadap permintaan informasi lowongan kerja mahasiswa tingkat akhir Jurusan Ilmu Komunikasi Untirta.

Skripsi tersebut revalan dengan penelitian ini karena membahas tentang pengaruh media Bursa Kerja *Online* terkait dengan kebutuhan informasi lowongan kerja. Sehingga hasil penelitian jurnal tersebut dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Rujukan Kesembilan membahas tentang Kajian Penerapan Bursa Kerja *Online* (BKOL) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kota Baru (Moethia Faridha, & Iwan Krisnadi, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Kerja *Online* (BKOL) Disnakertrans Kabupaten Kota Baru belum bisa dijalankan karena sumber daya manusia jumlah kelemahan yang dimiliki merupakan kendala yang cukup besar sehingga mempengaruhi penerapan bursa kerja *online*, informasi Bursa Kerja *Online* (BKOL) menggunakan internet memudahkan bagi industri dalam menginformasikan lowongan dan pencari kerja lebih mudah mengakses informasi lowongan sesuai kualifikasinya, informasi

melalui sms *gate way*. Saran dalam penelitian ini yaitu bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan bursa kerja *online*, buatlah *swot* bursa kerja *online* singkat dan sederhana.

Dalam skripsi tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena berisi tentang Bursa Kerja *Online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang lemah dapat menghambat penerapan Bursa Kerja *Online*. Sehingga, dapat menjadi referensi untuk penelitian ini.

Rujukan Kesepuluh membahas tentang Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda (Richard Christian 2016). Temuan penelitian menampilkan bahwa konsep keterbukaan dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan. Keadaan ini ditunjukkan dengan ketidakmampuan pencari kerja dan pengusaha untuk memanfaatkan keinginan mereka. Selain itu, pekerja kurang disiplin mengenai jam kerja dan penyusunan laporan prestasi kerja. Meskipun demikian, penerapan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi telah berhasil dilakukan, terbukti dengan diseminasi informasi oleh Disnaker Kota Samarinda mengenai pelayanan pencari kerja yang mudah, akurat, dan memadai untuk diakses masyarakat melalui buletin, papan atau baliho dan website, serta penyampaian produk layanan yang cepat dan memuaskan kepada pengguna jasa pencari kerja. Penulis menyimpulkan, berlandaskan hasil di lapangan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, khususnya untuk layanan pencari kerja. Studi ini menampilkan bahwa lebih banyak program dan acara, serta bursa kerja, diperlukan. Kemudian perlu adanya akuntabilitas kinerja dari

Disnaker Kota Samarinda, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pencari kerja.

Jurnal tersebut relevan dengan penelitian ini. Karena, membahas tentang informasi pelayanan pencari kerja. Sehingga dapat menjadi referensi dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Kebijakan dan Penerapan *E-Government* (Arumsari, K. D. & Winarno, W. A., 2012; Christian, R., 2016; Rahmat B. A., 2014; Anisa, C., 2011; Priadi, D., 2017; Yolanda M. Y., 2018). Namun ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas *E-service* (AW, A. M. F., Karim, M., & Ma'ruf, A., 2019). Kemudian ada yang membahas tentang Strategi Pemerintah (Ernawati, E. & Romika, R., 2014) dan ada juga penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh Media (Laya, H. & Badra, M., 2017).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian di atas hanya mendeskripsikan Implementasi Kebijakan *E-Government*, Efektivitas Penerapan Sistem *E-Performance*, Strategi Pemerintah Dalam Memperkecil Angka Pengangguran dan *E-Service* Dalam Bursa Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan, penelitian ini akan melihat dan membahas tentang Implementasi Bursa Kerja *Online* yang dinilai dari indikator pendukung keberhasilan implementasi seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Selain itu, pada penelitian ini juga membahas mekanisme pelayanan terhadap penggunaan Bursa Kerja *Online* serta menganalisis hambatan dan upaya

yang dilakukan terkait Implementasi *E-government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu membahas tentang Implementasi Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* dengan memfokuskan pada evaluasi penyelenggaraan Bursa Kerja *Online*. Dan memberikan tambahan data mengenai Bursa Kerja *Online*.

Dengan penggunaan paradigma konstruktivisme diharapkan penelitian ini menghasilkan data yang beragam dalam menyatakan topik penelitian dan teori-teori yang digunakan dapat mendukung pembahasan penelitian.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok.

2. Manfaat Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok agar kedepannya lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian yang terkait dengan Implementasi Pengawasan Sistem Merit, penulis membuat sistematika dalam lima Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan. Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dilakukan, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi penelitian akademik dan signifikansi penelitian praktis dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan implementasi pelayanan publik. dan selain itu menguraikan kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. Teori yang dirujuk dalam penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Menurut Edward III (dalam Leo Agustino (2016:137)).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan Paradigma Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Penentuan Populasi dan Sampel, Teknik Perolehan Data, Teknik Analisis Data, *Goodness dan Quality Criteria* Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Keterbatasan Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Implementasi *Electronic Government* Dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja *Online* di Kota Depok, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan, rekomendasi akademik, serta rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, jurnal, produk hukum dan alamat *website* yang digunakan sebagai referensi dalam laporan akhir ini.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi tentang keterangan-keterangan yang dianggap penting dan mendukung penulisan dalam penelitian ini.